



Penduduk Miskin dan Pemerataan Pendapatan *Kabupaten Magelang*

2013



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Penduduk Miskin dan
Pemerataan Pendapatan
Kabupaten Magelang

2013

Penduduk Miskin dan Pemerataan Pendapatan Kabupaten Magelang Tahun 2013

Nomor Publikasi :
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : vii + 47

Naskah

BPS Kabupaten Magelang

Cover

BPS Kabupaten Magelang

Diterbitkan oleh

BAPPEDA Kabupaten Magelang

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa, saya menyambut gembira atas terbitnya publikasi “ Penduduk Miskin dan Pemerataan Pendapatan Kabupaten Magelang Tahun 2013”. Publikasi ini dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Kesejahteraan dan penurunan kemiskinan merupakan tujuan dari pelaksanaan pembangunan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antar golongan masyarakat merupakan strategi untuk mencapai sasaran pembangunan, karena pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti dengan pemerataan akan melahirkan masalah sosial dan inefisiensi ekonomi. Untuk itu diperlukan data dukung berupa informasi yang berkaitan dengan intervensi yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan baik antar penduduk maupun antar wilayah.

Publikasi ini merupakan langkah maju dan upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyiapkan diri untuk melanjutkan pembangunan secara berkesinambungan dengan didukung oleh data yang tepat dan akurat.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih, kepada semua pihak yang telah membantu sampai terwujudnya penerbitan buku ini.

Kota Mungkid, November 2014

Plt. **KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MAGELANG**

Staff Ahli Bupati Bidang Ekbang



Drs. SUGIYONO, M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19640102 198405 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Intisari	vii
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Lingkup Pembahasan	2
1.4 Sumber Data	3
1.5 Sistematika Penyajian	4
2 Konsep dan Definisi	5
2.1 Konsep dan Definisi Kemiskinan	5
2.2 Penyebab Kemiskinan	6
2.3 Pengukuran Kemiskinan Satu Dimensi (Pendekatan Konsumsi)	6
2.3.1 Penghitungan Garis Kemiskinan (GK)	7
2.3.2 Indikator Kemiskinan Konsumsi	11
2.4 Ukuran Tingkat Ketimpangan/Kesenjangan	12
2.4.1 Rasio Gini	13
2.4.2 Kriteria Bank Dunia	14
2.4.3 <i>General Entropy Index</i>	15
2.4.4 Ukuran Ketimpangan Atkinson	17
2.5 Desain Pengukuran	17
2.6 Kalori	18
3 Analisis Kemiskinan	20
3.1 Garis Kemiskinan	20
3.2 <i>Headcount Index</i> (P0)	22
3.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan (<i>Poverty Gap Index</i> , P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (<i>Poverty Severity Index</i> , P2)	24
3.4 Program Pengentasan Kemiskinan	27
3.5 Lapangan Usaha Rumah Tangga Miskin	28

	Halaman
4 Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan	29
4.1 Gambaran Umum Ekonomi Kabupaten Magelang	29
4.2 Pola Konsumsi	30
4.3 Ukuran Ketimpangan	33
4.3.1 Kurva Lorenz	33
4.3.2 Rasio Gini	35
4.3.3 Ukuran Ketimpangan Bank Dunia	37
4.3.4 Indeks Theil T, Indeks Theil L dan Ketimpangan Atkinson	41
5 Penutup	44
5.1 Kesimpulan	44
5.2 Saran	45

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.	Klasifikasi Rasio Gini	14
Tabel 2.2.	Klasifikasi Tingkat Ketimpangan Distribusi Pengeluaran	15
Tabel 3.1.	Garis Kemiskinan Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 – 2013	20
Tabel 3.2.	Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 – 2013	23
Tabel 3.3.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (<i>Poverty Gap Index, P₁</i>) serta Tingkat Keparahan Kemiskinan (<i>Poverty Severity Index, P₂</i>) Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 – 2013	24
Tabel 3.4.	Persentase Rumah Tangga menurut Desil Pengeluaran per Kapita dan Akses pada pelayanan kesehatan gratis serta Raskin di Kabupaten Magelang, 2013	26
Tabel 3.5.	Persentase Rumah tangga Penerima Bantuan PNPM dan Kredit Usaha Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Magelang, 2013	27
Tabel 3.6.	Persentase Rumah tangga menurut Lapangan Usaha dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Magelang, 2013	28
Tabel 4.1.	Persentase Penduduk dan Rata-rata Pengeluaran perkapita Sebulan menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Magelang, 2013.....	31
Tabel 4.2.	Distribusi Persentase Pendapatan Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2005-2013	39
Tabel 4.3.	Indeks Theil T, Indeks Theil L dan Ketimpangan Atkinson di Kabupaten Magelang Tahun 2007-2013	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kurva Lorenz	13
Gambar 3.1. Garis Kemiskinan Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 – 2013	21
Gambar 3.2. Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Magelang Tahun 2004 – 2013	22
Gambar 3.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (<i>Poverty Gap Index</i> , P_1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (<i>Poverty Severity Index</i> , P_2) Kabupaten Magelang Tahun 2004 – 2013	25
Gambar 4.1. Perkembangan PDRB Perkapita dan PDRB ADH Berlaku Kabupaten Magelang, 2005-2013.....	29
Gambar 4.2. Komposisi Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang, 2009-2013	32
Gambar 4.3. Kurva Lorenz dari Rasio Gini Kabupaten Magelang tahun 2005-2013	34
Gambar 4.4. Perbandingan Rasio Gini dan PDRB ADHB Kabupaten Magelang, 2005-2013	35
Gambar 4.5. Hubungan Pertumbuhan Pendapatan, Distribusi Pendapatan, dan Kebijakan Pembangunan	37
Gambar 4.6. Distribusi Persentase Pendapatan Penduduk Kabupaten Magelang, 2005-2013	38
Gambar 4.7. Perbandingan Rasio Gini dan Distribusi Persentase Pendapatan Penduduk Kabupaten Magelang, 2005-2013	40

INTISARI

Publikasi dengan judul “Penduduk Miskin dan Pemerataan Pendapatan Kabupaten Magelang Tahun 2013” bertujuan untuk melakukan analisis tentang perkembangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Magelang. Hasil analisis ini diharapkan akan diketahui : (1) Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Magelang (2) Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Magelang (3) Perkembangan Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Magelang (4) Gambaran secara umum kondisi dan pola pengeluaran konsumsi penduduk Kabupaten Magelang (5) Tingkat pemerataan/ketimpangan pendapatan dengan rasio gini (*Gini ratio*) Kabupaten Magelang (6) Tingkat kesenjangan distribusi pendapatan menurut kriteria Bank Dunia.

Ukuran Tingkat kemiskinan dalam analisis ini menggunakan rata-rata pendapatan perkapita penduduk melalui pendekatan konsumsi makanan dan non makanan. Kesenjangan distribusi pendapatan diukur dengan membandingkan rata-rata pendapatan perkapita penduduk. Metode analisis menggunakan *Head Count Index* ($HCI-P_0$), Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index- P_1*), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index- P_2*). Indikator untuk mengukur kesenjangan distribusi pendapatan adalah Rasio Gini (*gini ratio*), dan kriteria Bank Dunia.

Dengan menggunakan data *time series* SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2004-2013 diperoleh hasil analisis sebagai berikut. (1) Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode 2004 – 2013 menunjukkan penurunan (2) Pendapatan masyarakat miskin Kabupaten Magelang semakin meningkat selama periode analisis (3) Ketimpangan pendapatan atau penyebaran rata-rata pendapatan diantara penduduk miskin semakin sempit (4) Adanya inefisiensi pelaksanaan bantuan program penanggulangan kemiskinan (5) Tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik (6) Ketimpangan distribusi pendapatan semakin meningkat.

Saran kebijakan berdasarkan hasil analisis sebagai berikut. (1) Monitoring dan evaluasi program (2) Penajaman kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan (3) Pengendalian harga kebutuhan dasar (4) Peningkatan pendapatan di lapangan usaha pertanian dan konstruksi (5) Memperbesar penduduk pada kelompok pengeluaran kelas menengah.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar dalam pembangunan daerah. Berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata yang kemudian memicu terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai dampak dari kemiskinan. Hal ini akan menjadi sangat serius apabila kedua masalah tersebut berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan inefisiensi ekonomi dan masalah sosial yang dampaknya cukup negatif.

Sampai dengan saat ini pembuat kebijaksanaan dan perencana pembangunan masih percaya bahwa proses pembangunan ekonomi pada akhirnya akan menghasilkan *“Trickle Down Effects”*. Sehingga didasarkan pada pemikiran tersebut, strategi pembangunan ekonomi yang dianut oleh banyak pemerintahan daerah lebih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa memperhatikan pemerataan pembangunan ekonomi. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pelaksanaan pembangunan ada pola pikir bahwa pembangunan terpusatkan pada sektor-sektor tertentu saja yang secara potensial memiliki kemampuan besar untuk menyumbang nilai pendapatan daerah yang tinggi. Sehingga banyak pemerintahan daerah percaya bahwa nantinya hasil dari pembangunan itu akan menetes ke pemerataan kesejahteraan.

Ada berbagai cara untuk mengetahui prestasi pembangunan yaitu dengan pendekatan ekonomi dan pendekatan non-ekonomi. Dalam pendekatan ekonomi dapat dilakukan berdasarkan tinjauan aspek pendapatan maupun aspek non pendapatan. Dalam aspek pendapatan digunakan konsep pendapatan perkapita, namun hal tersebut belum cukup untuk menilai prestasi pembangunan karena tidak mencerminkan bagaimana pendapatan daerah terdistribusi ke masyarakat, sehingga tidak memantau unsur keadilan atau pemerataan.

Salah satu indikator yang dapat mengukur dan mengevaluasi hasil dari pembangunan tersebut yaitu indikator kesenjangan distribusi pendapatan. Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar kelompok penduduk

adalah Rasio Gini (*Gini ratio*) dan kriteria Bank Dunia. Indikator ini perlu diketahui khususnya di Kabupaten Magelang karena dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan positif, pendapatan perkapita masyarakat terus mengalami peningkatan, namun dibalik itu persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran masih relatif tinggi. Untuk menjawab hal tersebut, perlu diadakan kajian mengenai kesenjangan distribusi pendapatan melalui publikasi “Penduduk Miskin dan Pemerataan Pendapatan di Kabupaten Magelang Tahun 2013”.

1.2. Tujuan

Kajian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan Kabupaten Magelang yang diikuti dengan upaya pengentasan kemiskinan dan distribusi pemerataannya. Secara spesifik penerbitan publikasi “*Penduduk Miskin dan Pemerataan Pendapatan di Kabupaten Magelang Tahun 2013*” ini mempunyai tujuh tujuan yaitu :

- i. Melihat perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Magelang tahun 2013
- ii. Mengetahui perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Magelang tahun 2004-2013
- iii. Mengetahui perkembangan Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Magelang tahun 2004-2013.
- iv. Memberikan gambaran secara umum kondisi dan pola pengeluaran konsumsi penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2004-2013.
- v. Tingkat pemerataan/ketimpangan pendapatan dengan rasio gini (*Gini ratio*) Kabupaten Magelang pada tahun 2004-2013.
- vi. Mengukur tingkat kesenjangan distribusi pendapatan menurut kriteria Bank Dunia
- vii. Memberikan gambaran dan bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan berkaitan dengan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

1.3. Lingkup Pembahasan

Lingkup bahasan dalam Publikasi ini mencakup analisis kemiskinan dan analisis ketimpangan pendapatan dalam lingkup Kabupaten Magelang dengan menggunakan indikator terpilih. Indikator yang dapat untuk mengukur kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan adalah cukup banyak, baik indikator ekonomi maupun indikator sosial. Indikator kemiskinan menggunakan *Head Count Index* (HCI-P₀) yaitu penduduk miskin berada

di bawah Garis kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*). Indikator yang sering digunakan untuk mengukur kesenjangan distribusi pendapatan adalah Rasio Gini (*gini ratio*) dan kriteria Bank Dunia. Sehingga publikasi ini menggunakan indikator Rasio Gini (*gini ratio*) dan kriteria Bank Dunia dalam melihat kesenjangan distribusi pendapatan.

Nilai *Gini ratio* berkisar antara nol dan satu. Bila rasio Gini sama dengan nol berarti distribusi pendapatan sangat merata karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Secara grafis, ditunjukkan oleh berimpitnya kurva Lorens dengan garis pemerataan sempurna. Kriteria Bank Dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah, yang dibagi kedalam tiga kategori.

1.4. Sumber Data

Sumber data utama dalam penyusunan publikasi ini menggunakan data primer dari data yang dikumpulkan dan di olah oleh Badan Pusat Statistik pada Modul Konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013. Cakupan dalam Susenas memungkinkan untuk disajikan dalam bentuk Publikasi ini karena cakupan variabel atau karakteristik pengeluaran yang dikumpulkan cukup memadai untuk disajikan sebagai input yang mampu mengindikasikan kondisi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Pengukuran indikator kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan didasarkan pada data pengeluaran (konsumsi) rumah tangga, bukan pendapatan. Data pengeluaran memang cenderung menciptakan 'bias ke bawah' (*downward bias*) dalam distribusi pendapatan. Orang miskin akan menggunakan hampir semua pendapatannya untuk konsumsi, sementara kelompok kaya akan menggunakan mayoritas pendapatan untuk ditabung. Tapi ada sejumlah alasan mengapa data konsumsi bisa lebih baik dari pendapatan.

1. Pendapatan individu atau rumah tangga di negara berkembang seperti Indonesia bisa sangat fluktuatif. *Timing* dilakukannya pendapatan yang dilakukan akan sangat berpengaruh. Seandainya pengumpulan data dilakukan pada saat panen rendah (paceklik), maka akan banyak mendapati banyak penduduk berpenghasilan nol atau negatif. Sebaliknya jika pendataan dilakukan pada saat panen raya maka penghasilan akan melonjak besar. Data konsumsi akan lebih mencerminkan pendapatan dalam jangka waktu lebih panjang. Meski pendapatan berkurang (atau nol), orang akan

berusaha untuk bisa tetap makan, bisa dengan menggunakan tabungan, meminjam atau menjual aset. Ini dikenal dengan proses *consumption smoothing*.

2. Meski kualitas data konsumsi juga memiliki banyak masalah, data pendapatan punya lebih banyak masalah, terutama bias dalam pengukuran pendapatan akan besar. Bagi banyak penduduk, pendapatan bukan hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk natura/barang. Hal ini akan menciptakan masalah dalam melakukan konversi ke dalam satuan uang. Belum lagi akan masalah kejujuran responden dalam menjelaskan jumlah pendapatan yang diterima. Selanjutnya selain masalah kejujuran permasalahan responden dapat *me-recall* dan pendapatan rinci yang diterima, mengingat pemahaman gaji berbeda dengan pendapatan.

1.5. Sistematika Penyajian

Publikasi ini disajikan secara sistematis dalam 5 (lima) bab sebagai berikut: Bab satu membicarakan masalah pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, lingkup pembahasan, sumber data dan sistematika penyajian. Bab dua membicarakan masalah konsep dan definisi yang berisi ukuran kesejahteraan, serta ukuran tingkat ketimpangan. Bab tiga membicarakan masalah analisis kemiskinan yang berisi berbagai ukuran kemiskinan dan program bantuan pengentasan kemiskinan. Bab empat analisis ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Magelang yang berisi berbagai ukuran ketimpangan, dan pola konsumsi. Bab lima menyajikan masalah saran kebijakan yang berisi pentingnya data kemiskinan dan ketimpangan, ketimpangan akses, dan strategi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.

BAB 2 KONSEP DAN DEFINISI

2.1. Konsep dan Definisi Kemiskinan

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang miskin Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain;

1. Pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.
2. Pendekatan pendapatan (*income approach*), kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat- alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya.
3. Pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*), menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan.
4. Pendekatan objective and subjective, pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian

normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan, sedangkan pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi–dimensi lain itu diperhitungkan.

2.2. Penyebab Kemiskinan

Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan. Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah:

1. kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal;
2. terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;
3. kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor;
4. adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung;
5. adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);
6. rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat;
7. budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya;
8. tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*);
9. pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

2.3. Pengukuran Kemiskinan Satu Dimensi (Pendekatan Konsumsi)

Untuk mengukur kemiskinan, digunakan pendekatan kebutuhan dasar atau dengan kata lain, konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Bank Dunia menggunakan dua kriteria dalam menentukan garis kemiskinan:

1. Menggunakan garis kemiskinan nasional yang didasarkan pada pola konsumsi 2 100 Kalori per hari.
2. Garis kemiskinan internasional berdasarkan PPP (*purchasing power parity*) 1 dolar AS dan 2 dolar AS, sehingga dapat digunakan sebagai standar internasional yang bisa diterapkan di seluruh negara. Nilai tukar PPP 1 dolar AS mempunyai pengertian berapa rupiah yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa, yang bisa dibeli dengan satu dolar atau dua dolar di Amerika Serikat. Nilai tukar ini dihitung secara berkala dari data harga dan kuantitas konsumsi sejumlah barang dan jasa untuk setiap negara.

Garis kemiskinan nasional yang dikeluarkan BPS yang berdasarkan pola konsumsi digunakan Bank Dunia untuk menganalisis profil kemiskinan, penyebab kemiskinan dan telaah strategi atau program antikemiskinan di sebuah negara.

2.3.1. Penghitungan Garis Kemiskinan (GK)

BPS dalam mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan pengeluaran, di mana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2 100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Teknik penghitungan GKM:

1. Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference populaion*) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2 100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata Kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} \cdot Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk}$$

Dimana :

GKM_j = Garis Kemiskinan Makanan Daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2 100 kilokalori).

P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j.

Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.

V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2 100 kilokalori dengan mengalikan 2 100 terhadap harga implisit rata-rata Kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_j = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}}$$

di mana :

K_{jk} = Kalori dari komoditi k di daerah j

\overline{HK}_j = Harga rata-rata Kalori di daerah j

$$F_j = \overline{HK}_j \times 2100$$

di mana :

F_j = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari atau GKM.

J = daerah (perkotaan/perdesaan).

3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dsan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan.

Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi.

Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$NF_p = \sum_{i=1}^n r_i \times V_i$$

di mana:

NF_p = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p (GKNM_p).

V_i = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).

r_i = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPPKD 2004).

I = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p.

P = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p} \cdot 100$$

$\%PM_p$ = % Penduduk miskin di provinsi p.

PM_p = Jumlah penduduk miskin di provinsi p.

P_p = Jumlah penduduk di provinsi p.

Sementara itu, penduduk miskin untuk level nasional merupakan jumlah dari penduduk miskin provinsi atau:

$$PM_I = \sum_{p=1}^n PM_p$$

PM_I = Penduduk miskin Indonesia.

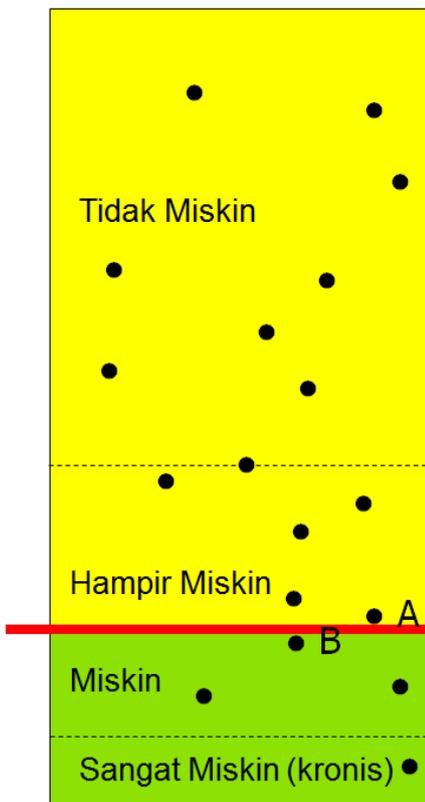
PM_p = Penduduk miskin provinsi p.

N = Jumlah provinsi.

Persentase penduduk miskin nasional adalah:

$$\%PM_1 = \frac{PM_1}{P_1}$$

- $\%PM_1$ = Persentase penduduk miskin (secara nasional).
 PM_p = Jumlah penduduk miskin (secara nasional).
 P_1 = Jumlah penduduk Indonesia.



KOMPONEN GARIS KEMISKINAN (GK):

- GK Makanan** => setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi
- GK Non Makanan** => kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan)

Garis Kemiskinan

(berbeda untuk setiap provinsi.
 Tahun 2013: Jawa Tengah Rp 261 881;
 Kabupaten Magelang Rp 235 430)

Note: Metode yang sama digunakan BPS sejak tahun 1998

2.3.2. Indikator Kemiskinan Konsumsi

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- Head Count Index (HCI-P₀)*, yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
4. Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha},$$

- α = 0, 1, 2
- z = Garis kemiskinan
- y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$
- q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- n = Jumlah penduduk

Jika $\alpha=0$, diperoleh *Head Count Index (P₀)*, jika $\alpha=1$ diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*) dan jika $\alpha=2$ disebut Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*).

2.4. Ukuran Tingkat Ketimpangan/Kesenjangan

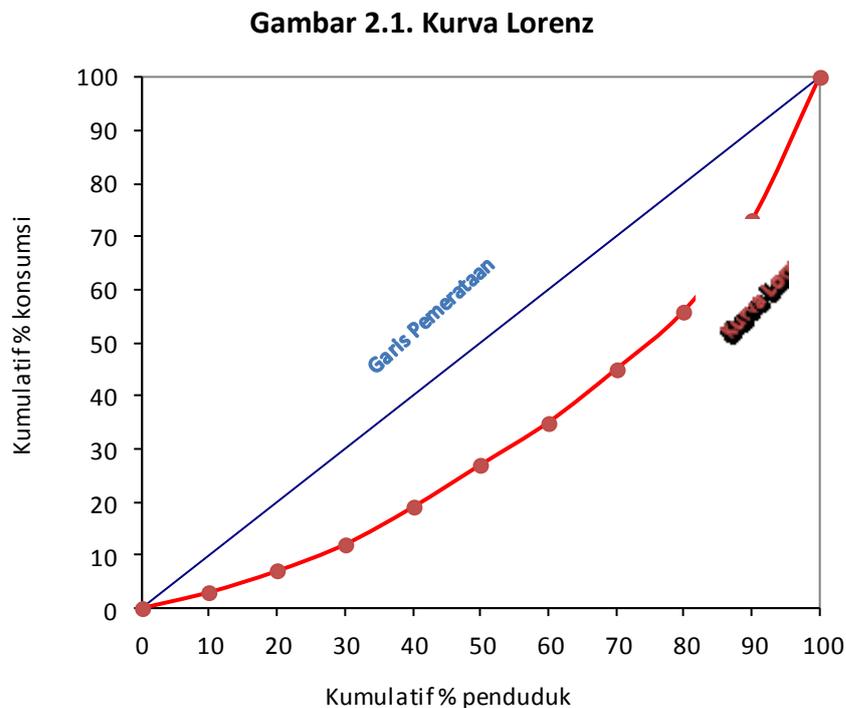
Ukuran kemiskinan menekankan pada keadaan individu atau rumahtangga yang berada pada posisi bawah dari distribusi pendapatan. Umumnya hal ini memerlukan informasi baik tentang rata-rata pendapatan (pengeluarannya) maupun distribusinya (pada posisi terendah). Ketimpangan, dilain pihak, merupakan sebuah konsep yang lebih luas dalam arti bahwa ketimpangan didefinisikan terhadap seluruh populasi, dan tidak hanya pada penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Sebagian besar ukuran ketimpangan tidak bergantung pada rata-rata dari distribusi, dan sifat ini dianggap sebagai sifat yang disenangi dari suatu ukuran ketimpangan.

Cara yang paling sederhana dalam mengukur ketimpangan dimulai dengan membagi penduduk menjadi lima bagian dari kelompok termiskin hingga kelompok terkaya, dan melaporkan tingkat atau proporsi pendapatan (atau pengeluaran) yang diterima oleh setiap kelompok. Informasi kuantil ini mudah dipahami, tetapi terkadang sebuah ukuran yang ringkas (sederhana) lebih baik dibanding seluruh angka-angka dalam tabel.

2.4.1. Rasio Gini

Ukuran ketimpangan tunggal yang paling luas digunakan adalah koefisien Gini. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, sebuah kurva frekuensi kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (pendapatan/pengeluaran) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili pemerataan. Kurva Lorenz diambil dari nama Conrad Lorenz, seorang ahli statistik Amerika yang pada tahun 1905. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujursangkar dimana sisi vertikal melambangkan persentase kumulatif pendapatan dan sisi horizontal mewakili persentase kumulatif penduduk sebagai penerima pendapatan. Penentuan tingkat ketimpangan berdasarkan Kurva Lorenz dilihat dari jarak kurva ini ke garis diagonal. Semakin dekat jarak Kurva Lorenz ke garis diagonal (kurvanya makin menyerupai garis lurus) menyiratkan distribusi pendapatan yang makin merata. Sebaliknya bila kurva semakin jauh dari garis diagonal menunjukkan distribusi pendapatan penduduk yang semakin timpang.

Untuk membentuk koefisien Gini, digambarlah grafik persentase kumulatif rumah tangga (dari termiskin hingga terkaya) pada sumbu horizontal, dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Dari gambar tersebut dapat dilakukan interpretasi bahwa garis diagonal berwarna biru mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai Kurva Lorenz yang berwarna merah, dimana jika koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika koefisien Gini bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna.

Rumus untuk menghitung Rasio gini yang merefleksikan luas kurva dari diagram diatas adalah :

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^k f_i (y_i^* + y_{i-1}^*)$$

Dimana :

y_i : proporsi kumulatif dari jumlah pendapatan rumahtangga sampai kelas ke i

f_i : proporsi jumlah rumahtangga dalam kelas ke i

k : jumlah kelas

Selanjutnya rasio gini tersebut memiliki kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.1. Klasifikasi Rasio Gini

No.	Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
(1)	(2)	(3)
1.	< 0,4	Tingkat Ketimpangan Rendah
2.	0,4-0,5	Tingkat Ketimpangan Sedang
3.	> 0,5	Tingkat Ketimpangan Tinggi

Sumber: Bank Dunia

2.4.2. Kriteria Bank Dunia

Ukuran lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan penduduk adalah Kriteria Bank Dunia. Ukuran ini membagi penduduk menjadi tiga kelompok pendapatan yakni kelompok 40 persen berpendapatan terendah, 40 persen berpendapatan menengah dan 20 persen berpendapatan tertinggi. Kriteria Bank Dunia pada ulasan ini menggunakan data pengeluaran, hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data pengeluaran lebih teliti daripada data pendapatan dan data pengeluaran dapat digunakan sebagai pendekatan dari pendapatan. Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan diukur dengan besarnya bagian pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah dengan batasan sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Klasifikasi Tingkat Ketimpangan Distribusi Pengeluaran

No.	Tingkat Ketimpangan	Distribusi Pendapatan
(1)	(2)	(3)
1.	Tinggi	Kelompok 40% penduduk termiskin pengeluarannya <12% dari keseluruhan pengeluaran.
2.	Sedang	Kelompok 40% penduduk termiskin pengeluarannya antara 12%-17% keseluruhan pengeluaran.
3.	Rendah	Kelompok 40% penduduk termiskin pengeluarannya >17% dari keseluruhan pengeluarannya.

Sumber: Bank Dunia

2.4.3. *General Entropy Index*

Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan. Untuk melihat hal ini, perlu mempertimbangkan beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik, misalnya:

1. Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
2. Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
3. Simetris. Jika anda dan saya bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
4. Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat :

1. Dapat didekomposisi.

Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai rasio gini dari sub-kelompok masyarakat.

2. Dapat diuji secara statistik.

Seseorang harus dapat menguji signifikan perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik bootstrap interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

Ada sejumlah ukuran ketimpangan yang memenuhi semua (enam) kriteria diatas, diantaranya yang paling banyak digunakan adalah indeks Theil dan ukuran deviasi log rata-rata. Kedua ukuran tersebut masuk dalam famili ukuran ketimpangan "*general entrophy*". Rumus secara umum yang dapat ditulis sbb:

$$GE(\alpha) = \frac{1}{\alpha(\alpha-1)} \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)^\alpha - 1 \right)$$

Di mana \bar{y} adalah rata-rata pendapatan per orang (atau pengeluaran per kapita). Nilai-nilai ukuran GE bervariasi mulai dari nol sampai tidak terhingga, dengan nol mewakili distribusi yang merata, sedangkan nilai yang lebih tinggi mewakili tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Parameter α dalam kelas GE mewakili bobot yang diberikan untuk jarak-jarak antara pendapatan di berbagai bagian yang berbeda dari distribusi pendapatan, dan dapat memiliki nilai riil berapa pun. Untuk nilai α yang lebih rendah, GE lebih sensitif terhadap perubahan di bagian bawah dari distribusi tersebut, dan untuk nilai α yang lebih tinggi, GE lebih sensitif terhadap perubahan yang memengaruhi bagian atas. Nilai α yang paling umum digunakan adalah 0, dan 1. GE(1) adalah indeks Theil's T, memiliki formula sebagai berikut:

$$GE(1) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{y_i}{\bar{y}} \log \frac{y_i}{\bar{y}}$$

GE(0) dikenal sebagai Theil's L atau ukuran *mean log deviation* memiliki formula sebagai berikut:

$$GE(0) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log \frac{\bar{y}}{y_i}$$

2.4.4. Ukuran Ketimpangan Atkinson

Atkinson (1970) telah mengusulkan kelas ukuran ketimpangan lainnya yang digunakan lan waktu ke waktu. Kelas ini juga memiliki parameter pembobot ε (yang mengukur)enghindaran ketimpangan). Kelas Atkinson, didefinisikan sebagai berikut:

$$A_{\varepsilon} = 1 - \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\frac{y_i}{y} \right]^{1-\varepsilon} \right]^{\frac{1}{\varepsilon(1-\varepsilon)}}$$

Dimana, ε adalah parameter ketimpangan ($0 < \varepsilon < 1$), semakin tinggi nilai ε maka semakin tidak seimbang pembagian pendapatan. Nilai A terletak antara 0 sampai 1. Nilai A sama dengan nol berarti tidak ada ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

2.5. Desain Pengukuran

Pengukuran tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan biasanya didekati dengan menggunakan data pengeluaran, karena data pendapatan masyarakat tersebut ternyata masih sulit diperoleh. Dalam hal ini analisis tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumahtangga dari hasil Susenas. Bagaimana pun juga, distribusi pengeluaran tidak akan sama dengan distribusi pendapatan. Namun cara ini dianggap sebagai pendekatan yang rasional untuk melihat trend dari distribusi pendapatan, walaupun harus diinterperstasikan secara hati-hati.

Melalui Susenas Tahun 2013, nilai pendapatan masyarakat Kabupaten Magelang diestimasi dari data konsumsi dengan pendekatan rata-rata pengeluaran rumahtangga perbulan. Data yang dikumpulkan adalah data konsumsi yang mencakup seluruh kebutuhan hidup masyarakat. Mengingat jumlah komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat sangat banyak dan beragam, maka dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu konsumsi kelompok makanan dan konsumsi kelompok bukan makanan.

A. Konsumsi makanan, meliputi :

1. Konsumsi padi-padian (Beras, jagung terigu, dll)
2. Konsumsi umbi-umbian (ketela, kentang, sagu, dll)
3. Konsumsi ikan/udang/cumi/kerang (segar dan diawetkan)
4. Konsumsi daging (sapi, kerbau, kambing, ayam dll)
5. Konsumsi telur dan susu

6. Konsumsi sayur-sayuran (bayam, wortel, cabe, dll)
7. Konsumsi kacang-kacangan
8. Konsumsi buah-buahan
9. Konsumsi Minyak dan lemak
10. Konsumsi bahan minuman (gula, teh, kopi, coklat, sirup, dll)
11. Konsumsi bumbu-bumbuan (garam, kemiri, merica, terasi, kecap, dll)
12. Konsumsi lainnya (mie instan/basah, bihun, makaroni, kerupuk dll)
13. Konsumsi makanan dan minuman jadi (roti, biskuit, bakso, nasi rames, minuman beralkohol dan non alkohol)
14. Konsumsi tembakau dan sirih.

B. Konsumsi non makanan, meliputi :

1. Perumahan dan fasilitas rumahtangga (sewa/perkiraan sewa, pemeliharaan/perbaikan ringan, rekening listrik/air/telepon, gas, minyak tanah, pulsa dll)
2. aneka barang dan jasa (sabun/kosmetik, biaya kesehatan, pendidikan, transport, jasa lainnya.
3. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala.
4. Barang tahan lama (alat rumahtangga, elektronik dll)
5. Pajak, pungutan dan asuransi.
6. Keperluan pesta dan upacara, tidak termasuk makanan.

Untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu terakhir, baik yang berasal dari pembelian, produksi sendiri maupun dari pemberian. Sedang untuk pengeluaran bukan makanan ditanyakan kondisi sebulan yang lalu dan satu tahun terakhir, baik yang berasal dari pembelian, produksi sendiri maupun dari pemberian. Desain kuesioner secara detail dibuat dengan harapan responden mampu mengingat nilai konsumsi yang dikeluarkannya.

2.6. Kalori

Kalori adalah satuan ukuran untuk energi. Satu kalori secara resmi didefinisikan sebagai jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 cm³ air (atau 1 gram air) sebesar satu derajat Celcius. Untuk mengukur jumlah energi dalam makanan, ahli gizi umumnya menggunakan kilokalori (setara dengan 1 000 kalori), dan label pengukuran mencantumkan sebagai “kkal” atau sebagai “Kalori” dengan “K” besar. Satu kkal setara dengan sekitar 4,184 kalori

BAB 3

ANALISIS KEMISKINAN

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Perubahan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat melalui analisis tren tingkat kemiskinan antara kondisi tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Analisis ini mencakup garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, serta profil rumah tangga miskin.

3.1. Garis Kemiskinan

BPS dalam mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan pengeluaran, di mana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan dinyatakan sebagai besarnya pengeluaran yang mampu memenuhi kecukupan 2100 kalori perkapita perhari untuk kebutuhan minimum makanan ditambah dengan kebutuhan minimum bukan makanan seperti: perumahan, bahan bakar, sandang, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Garis kemiskinan di Kabupaten Magelang pada periode 2004 - 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp 121 477,- perkapita perbulan yaitu dari Rp 113 953,- pada tahun 2004 menjadi Rp 235 430,- pada tahun 2013 atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp 12 147,- pada tiap tahunnya. Secara persentase meningkat rata-rata sebesar 10,66 persen pertahunnya.

Pada tahun 2004 di Kabupaten Magelang seseorang harus mampu mengeluarkan minimal Rp.113 953,- sebulan untuk tidak tergolong dalam kelompok penduduk miskin. Jadi apabila dalam suatu rumah tangga terdiri dari 4 anggota rumah tangga maka setiap

bulannya rumah tangga tersebut harus mengeluarkan minimum Rp.455 812,- untuk tidak tergolong dalam kelompok penduduk miskin. Namun sepuluh tahun kemudian (2013), kenaikan harga barang-barang konsumsi telah menaikkan garis kemiskinan menjadi Rp. 235 430,- atau jika dalam rumah tangga terdiri dari 4 anggota rumah tangga maka untuk tidak tergolong dalam kelompok penduduk miskin rumah tangga tersebut harus mengeluarkan minimum Rp. 941 720 setiap bulannya.

Tabel 3.1.

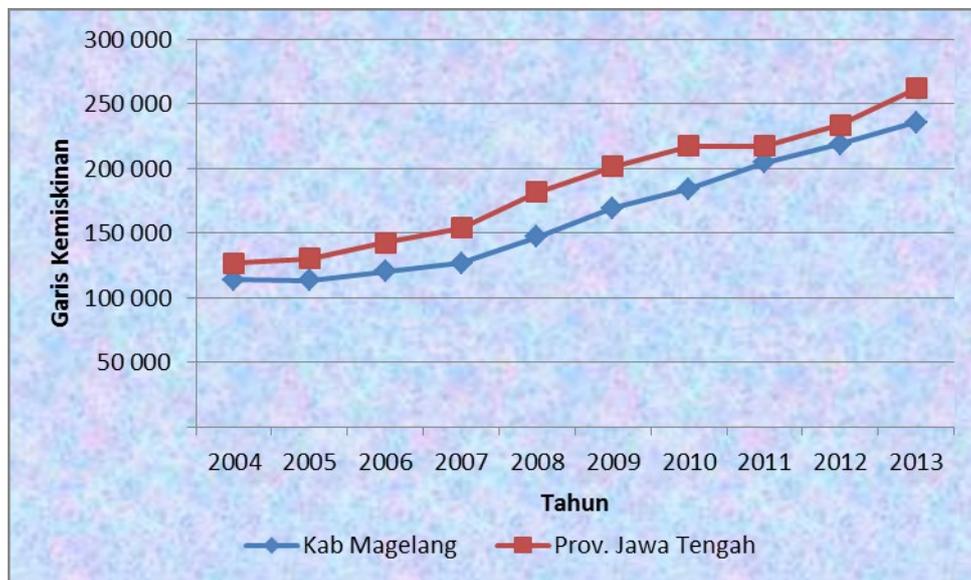
**Garis Kemiskinan Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2004 – 2013**

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	
		Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2004	113 953	126 651
2	2005	113 279	130 013
3	2006	120 111	142 337
4	2007	126 638	154 111
5	2008	146 910	181 877
6	2009	169 158	201 651
7	2010	184 053	217 327
8	2011	204 430	217 440
9	2012	218 950	233 769
10	2013	235 430	261 881

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kenaikan garis kemiskinan yang tidak diikuti peningkatan kemampuan daya beli berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin. Gambar 3.1. menunjukkan bahwa periode 2004 – 2013, baik di Propinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Magelang terjadi kenaikan batas garis kemiskinan di mana garis kemiskinan Kabupaten Magelang selama periode 2004-2013 lebih rendah daripada angka Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 3.1.
Garis Kemiskinan Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2004 – 2013



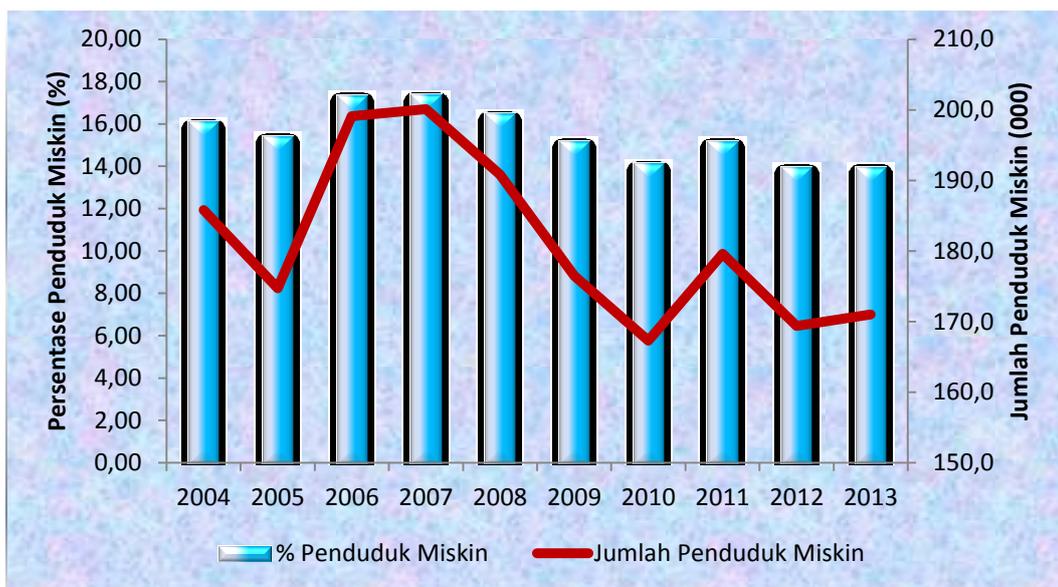
3.2. *Headcount Index (P₀)*

Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Pengukuran kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index/Head Count Ratio (P₀)*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Indikator ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Gambar 3.2 dan Tabel 3.2 menunjukkan perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang pada periode 2004-2013. Tingkat kemiskinan ini mencakup jumlah dan persentase penduduk miskin. Pada periode tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang relatif mengalami kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin terjadi pada tahun 2006 dan 2007 sebagai dampak dari kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar serta tahun 2011 akibat terjadinya krisis

global. Persentase penduduk miskin terendah di Kabupaten Magelang selama periode 2004 – 2013 terjadi pada tahun 2013 sebesar 13,96 persen, sedangkan persentase penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 17,37 persen. Sebagaimana halnya Kabupaten Magelang pada level provinsi, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah selama 2004—2013 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2004, Persentase penduduk miskin mencapai 21,11 persen, kemudian turun menjadi 14,44 persen pada tahun 2013. Selama periode tersebut kenaikan persentase penduduk miskin terjadi pada tahun 2006 sebesar 22,19 persen.

Gambar 3.2.
Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Magelang Tahun 2004 – 2013



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Perkembangan tingkat kemiskinan periode 2004 – 2013 Provinsi Jawa Tengah hampir sama dengan Kabupaten Magelang. Dampak kebijakan pemerintah pusat dengan menaikkan harga bahan bakar minyak hanya berpengaruh pada tahun 2006 terhadap pengurangan tingkat kemiskinan, sedangkan krisis global yang terjadi tidak mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan. Adapun jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2004 ke 2013 turun sebanyak 2,03 juta jiwa, yaitu dari sebanyak 6,84 juta jiwa pada tahun 2004 menjadi 4,81 juta jiwa pada tahun 2013. Secara

relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada periode tersebut dari 21,11 persen pada tahun 2004 menjadi 14,44 persen pada tahun 2013.

Tabel 3.2.
Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah
Penduduk Miskin Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2004 – 2013

No	Tahun	Persentase Penduduk Miskin		Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan)	
		Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2004	16,10	21,11	185,8	6 843,8
2	2005	15,42	20,49	174,7	6 533,5
3	2006	17,36	22,19	199,1	7 100,6
4	2007	17,37	20,43	200,1	6 557,2
5	2008	16,49	18,99	190,8	6 122,6
6	2009	15,19	17,48	176,5	5 655,4
7	2010	14,14	16,11	167,3	5 218,7
8	2011	15,18	16,21	179,6	5 256,0
9	2012	13,97	14,98	169,4	4 952,1
10	2013	13,96	14,44	171,0	4 811,3

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

3.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index, P₁*) serta Tingkat Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index, P₂*).

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Indikator *Headcount Index/Head Count Ratio (P₀)* atau dengan melihat persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap tidak berubah jika seorang yang miskin menjadi lebih miskin.

Tabel 3.3.
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index, P_1) serta Tingkat Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index, P_2) Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 – 2013

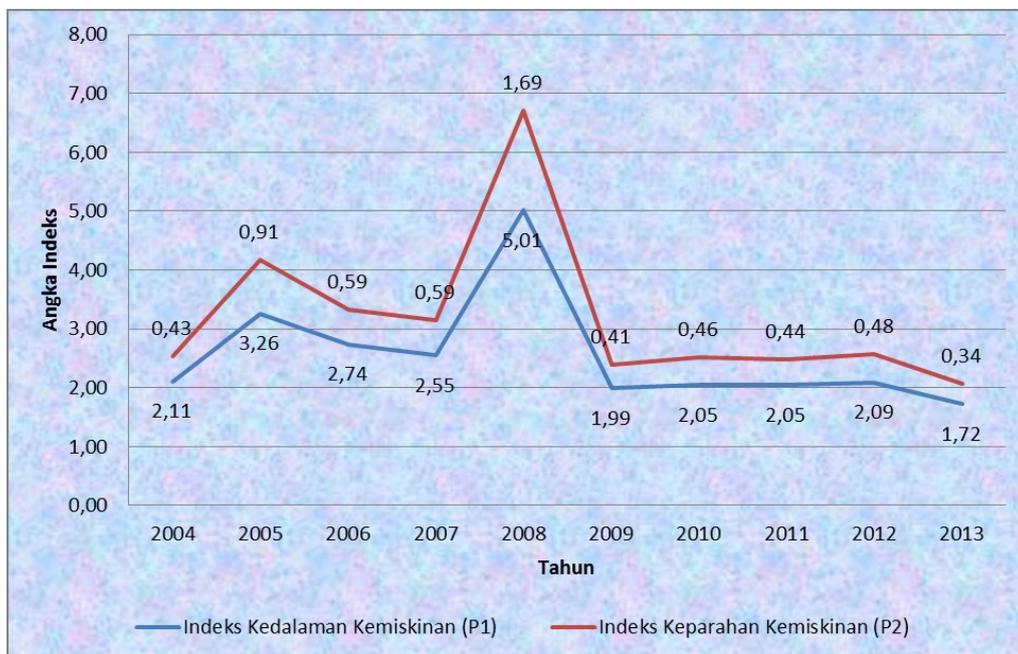
No	Tahun	P_1 (Kedalaman Penduduk Miskin)		P_2 (Keparahan Penduduk Miskin)	
		Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)
1	2004	2,11	3,58	0,43	0,96
2	2005	3,26	3,51	0,91	0,93
3	2006	2,74	3,69	0,59	0,94
4	2007	2,55	3,84	0,59	1,08
5	2008	5,01	4,25	1,69	1,24
6	2009	1,99	2,89	0,41	0,87
7	2010	2,05	2,62	0,46	0,68
8	2011	2,05	2,58	0,44	0,66
9	2012	2,09	2,39	0,48	0,57
10	2013	1,72	2,37	0,34	0,59

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Oleh karena itu, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah indikator kemiskinan yang lain yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*, P_1) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*, P_2). Tingkat kedalaman kemiskinan menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan. Penurunan pada P_1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman kemiskinan. Sedangkan penurunan pada P_2 mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Pada periode tahun 2004 – tahun 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Kabupaten Magelang semakin menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,11 pada tahun 2004 menjadi 1,72 pada tahun 2013. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan masyarakat miskin yang ditandai dengan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin rendah. Indeks kedalaman kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 5,01 dan tahun 2005 sebesar 3,26.

Gambar 3.3
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index, P_1) dan
Tingkat Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index, P_2) Kabupaten Magelang
Tahun 2004 – 2013



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Indeks kedalaman kemiskinan P_1 di Kabupaten Magelang tahun 2013 sebesar 1,72 persen berarti bahwa rata-rata defisit pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Magelang terhadap garis kemiskinan Rp 235.340,- adalah sebesar 1,72 persen. Sedangkan tingkat keparahannya P_2 sebesar 0,34 persen berarti penyebaran rata-rata pengeluaran diantara penduduk miskin sebesar 0,34 persen. Penurunan indeks P_1 dan P_2 dapat dimaknai dengan:

1. Kenaikan tingkat pengeluaran dalam hal ini konsumsi penduduk miskin memperpendek jarak terhadap garis kemiskinan.

2. Ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin semakin sempit.

3.4. Program Pengentasan Kemiskinan

Banyak program pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan penduduk. Misalnya pelayanan kesehatan gratis maupun beras miskin. Tabel 3.4 menunjukkan bahwa cakupan program tersebut menyebar relatif merata pada seluruh kelompok pengeluaran. Berarti program pelayanan kesehatan gratis dengan adanya kartu jamkesmas dan jamkesda tersebut tidak terfokus atau dinikmati oleh penduduk di kelompok pengeluaran terendah saja. Sedangkan pada program raskin penduduk dengan pengeluaran terendah memiliki persentase terbesar yang dicakup program tersebut.

Tabel 3.4.
Persentase Rumah Tangga menurut Desil Pengeluaran per Kapita dan Akses pada pelayanan kesehatan gratis serta Raskin di Kabupaten Magelang, 2013

Desil Pengeluaran perkapita	Ada ART yang memiliki Jamkesmas/Jamkesda	Rumah Tangga pernah membeli beras raskin selama 3 bln terakhir
(1)	(2)	(3)
1	61,18	92,19
2	54,12	88,62
3	50,23	86,40
4	45,34	83,44
5	41,07	77,34
6	35,31	75,48
7	30,40	68,67
8	25,58	61,72
9	17,64	43,72
10	9,83	25,43

Sumber: Susenas 2013

Program kredit usaha juga ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan penduduk. Berbagai macam kredit usaha diselenggarakan seperti PNPM mandiri, kredit usaha rakyat (KUR), program Bank selain KUR, program koperasi, maupun kredit usaha yang disediakan perorangan. Data Susenas 2013 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga di 10 % pengeluaran terbawah yang mendapatkan kredit masih rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya. Tabel 3.5 di bawah

menunjukkan bahwa rumah tangga di desil pengeluaran paling bawah memperoleh akses yang tidak besar pada kredit usaha.

Tabel 3.5.
Persentase Rumah tangga Penerima Bantuan PNPM dan Kredit Usaha
Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Magelang, 2013

Desil Pengeluaran perkapita	Program Bantuan PNPM	Program Bantuan Kredit Usaha
(1)	(2)	(3)
1	2,93	6,15
2	2,81	7,55
3	3,11	8,83
4	3,46	9,82
5	3,35	10,93
6	3,78	12,13
7	3,46	10,85
8	3,46	13,27
9	2,67	14,03
10	1,97	13,51

Sumber: Susenas 2013

3.5. Lapangan Usaha Rumah Tangga Miskin

Informasi lapangan usaha rumah tangga diperlukan untuk merencanakan program bantuan yang tepat dan sesuai dalam rangka pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Hasil Susenas 2013 seperti tersaji dalam Tabel 3.6 menunjukkan rumah tangga dengan desil rendah sebagian besar bekerja pada lapangan usaha pertanian dan konstruksi. Hal ini mengindikasikan penduduk miskin banyak yang bekerja sebagai buruh di lapangan usaha pertanian dan konstruksi di mana kedua lapangan usaha tersebut tidak memerlukan kemampuan khusus dan pendidikan tinggi.

Tabel 3.6.
Persentase Rumah Tangga menurut Lapangan Usaha
dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Magelang, 2013

Desil Pengeluaran perkapita	Lapangan Usaha		
	Pertanian	Konstruksi	lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
1	49,94	10,43	39,64
2	41,56	12,76	45,68
3	35,13	14,43	50,44
4	32,06	14,14	53,80
5	29,48	11,89	58,63
6	24,35	11,44	64,22
7	21,67	13,45	64,88
8	20,84	10,65	68,50
9	12,25	8,15	79,59
10	10,60	7,03	82,37

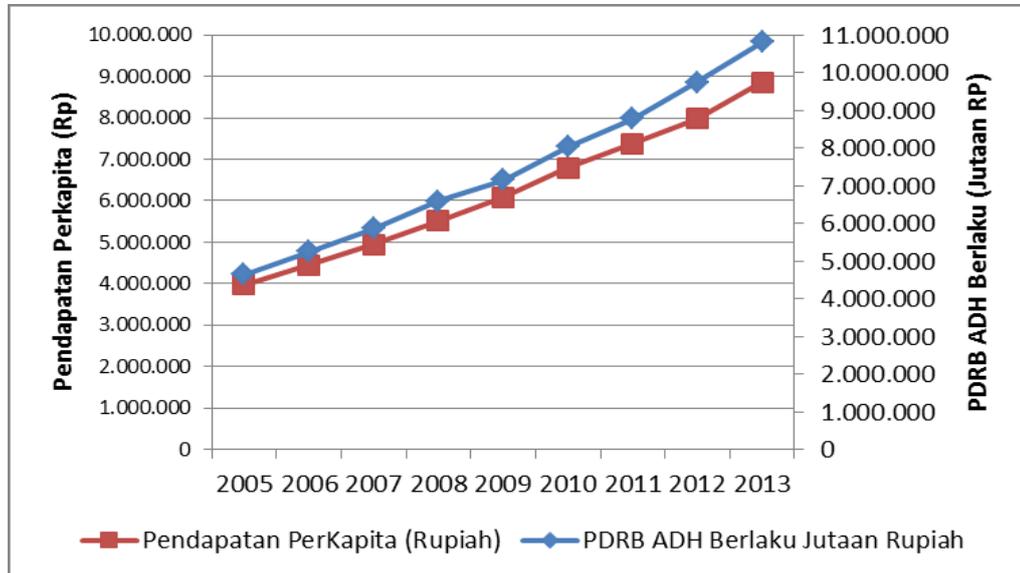
Sumber: Susenas 2013

BAB 4 ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

4.1. Gambaran Umum Ekonomi Kabupaten Magelang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator kondisi perekonomian suatu daerah, karena PDRB menggambarkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Untuk menggambarkan struktur perekonomian suatu daerah digambarkan dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), karena PDRB ADHB merupakan seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu wilayah dengan menggunakan harga pada tahun berjalan. Selanjutnya PDRB perkapita digunakan untuk melihat nilai rata-rata PDRB tiap kepala, yaitu dengan menghitung hasil bagi antara PDRB ADH Berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun bersangkutan. PDRB perkapita dapat dipakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat tiap penduduk di suatu daerah.

Gambar 4.1.
Perkembangan PDRB Perkapita dan
PDRB ADH Berlaku Kabupaten Magelang, 2005-2013



Sumber : BPS Kabupaten Magelang

Angka PDRB ADHB Kabupaten Magelang dari tahun 2005 hingga 2013 terus mengalami peningkatan. Hasil perhitungan PDRB Kabupaten Magelang tahun 2013 sebesar 10 814,29 milyar rupiah, meningkat dari sebesar 4 640,40 milyar rupiah pada tahun 2005.

Peningkatan PDRB ADHB ini diikuti peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Magelang, di mana pada tahun 2013 mencapai 8,85 juta rupiah, naik dari hanya sebesar 3,96 juta rupiah di tahun 2005.

Kendati secara kasat mata berdasarkan perkembangan PDRB ADHB dan PDRB perkapita menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan, namun hal tersebut belum mencerminkan bagaimana pendapatan daerah terdistribusi ke masyarakat. Untuk itu diperlukan penghitungan mengenai distribusi pendapatan di mana perhatiannya bukan hanya pada peningkatan pendapatan melainkan distribusi itu sendiri.

4.2. Pola Konsumsi

Keadaan ekonomi rumahtangga di suatu daerah dapat diamati dari besar kecilnya tingkat pendapatan rumahtangga, atau dapat dikatakan juga bahwa tingkat kesejahteraan suatu rumahtangga dapat dilihat dari tingkat pendapatan per kapita. Namun demikian untuk memperoleh data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, maka pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan konsumsi rumahtangga.

Dalam ilmu ekonomi, pengertian konsumsi lebih luas dari pada pengertian konsumsi dalam percakapan sehari-hari. Dalam percakapan sehari-hari konsumsi hanya dimaksudkan sebagai hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Dalam ilmu ekonomi, semua barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya disebut pengeluaran konsumsi. Dikonsumsi artinya digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Untuk memperoleh berbagai kebutuhan tersebut seseorang memerlukan pengeluaran untuk konsumsi. Dari semua pengeluaran yang dilakukan tersebut sekurang-kurangnya dapat memenuhi tingkat kebutuhan minimum yang diperlukan.

Pola konsumsi penduduk merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk. Rata-rata pengeluaran penduduk didapat dengan membagi jumlah seluruh pengeluaran penduduk baik makanan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lainnya dengan jumlah anggota rumah tangga keseluruhan. Rata-rata pengeluaran penduduk dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan dari penduduk yang bersangkutan.

Tabel 4.1.
 Persentase Penduduk dan Rata-rata Pengeluaran perkapita Sebulan menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Magelang, 2013

Kelompok Pengeluaran	% Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan (RP)	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<100 000	-	-	-	-
100 000 – 149 999	1,30	136 395	66,69	33,31
150 000 – 199 999	10,74	180 127	65,06	34,94
200 000 – 299 999	32,97	246 757	63,05	36,95
300 000 – 499 999	29,72	377 202	60,70	39,30
500 000 – 749 999	14,32	602 770	57,75	42,25
750 000 – 999 999	5,57	861 482	50,02	49,98
>1 000 000	5,39	1 683 003	33,45	66,55
Kab. Magelang	100,00	439 594	53,98	46,02

Sumber : Susenas 2013

Komposisi pengeluaran penduduk dapat dijadikan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Semakin kecil persentase pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Di banyak wilayah yang sedang berkembang, pemenuhan kebutuhan makanan masih menjadi prioritas utama, karena untuk memenuhi kebutuhan gizi. Tabel 4.1 menampilkan persentase penduduk dan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan menurut kelompok barang dan pengeluaran di Kabupaten Magelang tahun 2013.

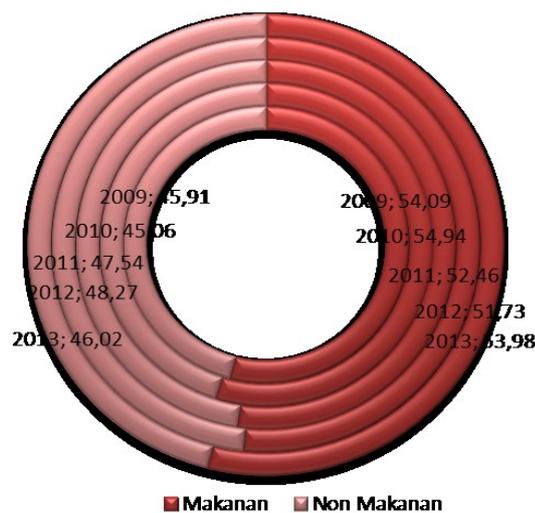
Menurut jenis pengeluaran, konsumsi terbesar penduduk Kabupaten Magelang digunakan untuk pengeluaran makanan sebesar 53,98 persen dan sisanya 46,02 persen non makanan. Selanjutnya jika dilihat dari kelompok pengeluaran pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa kelompok pengeluaran 200 000 – 299 999 rupiah memiliki persentase tertinggi dengan nilai sebesar 32,97 persen dari penduduk Kabupaten Magelang. Diikuti kelompok pengeluaran 300 000 – 499 999 rupiah mencapai 29,72 persen. Hasil ini memberikan

gambaran bahwa lebih dari setengah atau tepatnya sekitar 62,69 persen penduduk Kabupaten Magelang berada dalam golongan pengeluaran 200 000 – 499 999 rupiah.

Berdasarkan jenis pengeluaran, tahun 2013 kelompok pengeluaran tertinggi untuk konsumsi makanan berada pada kelompok pengeluaran 100 000 – 149 999 rupiah di mana penduduk yang berada dalam kelompok pengeluaran tersebut 66,69 persen konsumsinya untuk makanan dan sisanya 33,31 persen digunakan untuk konsumsi non makanan. Sementara itu, pengeluaran terendah untuk konsumsi makanan berada pada kelompok pengeluaran di atas 1 juta di mana penduduk yang berada dalam kelompok pengeluaran tersebut konsumsi untuk makanan sebesar 33,45 persen dan non makanan sebesar 66,55 persen.

Dari angka tersebut dapat lebih menjelaskan bahwa pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran makanan ke pengeluaran non makanan. Porsi pengeluaran masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi terhadap kebutuhan non makanan seperti: perumahan, barang dan jasa, pakaian, dan barang tahan lama (kendaraan, perhiasan dan sebagainya) biasanya lebih besar dibanding masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah.

Gambar 4.2
Komposisi Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang, 2009-2013



Sumber : Susenas 2009 - 2013

Gambaran perkembangan pergeseran pola konsumsi rumahtangga Kabupaten Magelang Tahun 2009 – 2013 tersaji dalam Gambar 4.2. Selanjutnya dengan komposisi distribusi pengeluaran tersebut mengindikasikan juga bahwa tuntutan kebutuhan untuk memenuhi konsumsi makanan masih merupakan tuntutan utama yang harus dipenuhi oleh penduduk Kabupaten Magelang. Komposisi pengeluaran seperti di atas tentunya akan terus bergeser dengan semakin membesarnya porsi pengeluaran pada kelompok non makanan, jika kesejahteraan penduduk Kabupaten Magelang kian hari kian membaik.

Disamping menggunakan tingkat pendapatan/pengeluaran pada tahun 2013, tingkat kesejahteraan rumahtangga juga dapat diukur dari perkembangan komposisi konsumsi penduduk, berupa konsumsi makanan dan non makanan dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya kesejahteraan penduduk dikatakan semakin baik, apabila persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan semakin kecil. Penduduk dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan penduduk tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan penduduk, makin kecil proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran penduduk.

Bila melihat komposisi pola konsumsi masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2009 – 2013 terlihat bahwa pengeluaran konsumsi untuk makanan tahun 2009 ke tahun 2013 bergeser dari 54,09 persen menjadi 53,98 persen dan konsumsi non makanan bergeser dari 45,91 persen menjadi 46,02 persen, secara teoritis tidak ada perubahan secara nyata komposisi pola konsumsi atau dapat dikatakan bahwa masyarakat Kabupaten Magelang tidak mengalami perubahan kesejahteraan.

Ukuran Ketimpangan

4.3.1. Kurva Lorenz

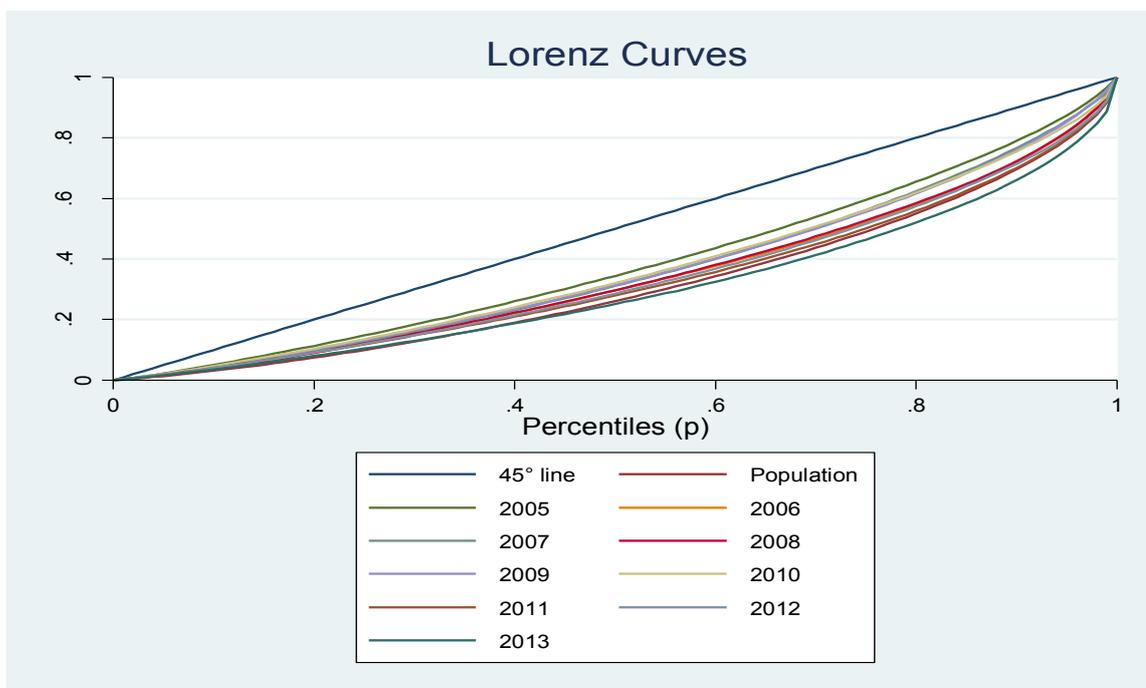
Kurva Lorenz merupakan sebuah kurva frekuensi kumulatif yang membandingkan distribusi pengeluaran dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili pemerataan. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujursangkar di mana sisi vertikal melambangkan persentase kumulatif pendapatan dan sisi horizontal mewakili persentase kumulatif penduduk sebagai penerima pendapatan. Penentuan tingkat ketimpangan berdasarkan Kurva Lorenz dilihat dari jarak kurva ini ke garis diagonal. Semakin dekat jarak Kurva Lorenz ke garis diagonal menyiratkan distribusi pendapatan yang makin merata. Sebaliknya bila

kurva semakin jauh dari garis diagonal menunjukkan distribusi pendapatan penduduk yang semakin timpang.

Pola yang tampak dari Kurva Lorenz menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Magelang yang diukur melalui pengeluaran per kapita tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 memberikan gambaran bahwa tingkat pemerataan pendapatan dari penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2013 tidak lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, kendati perubahan tiap tahunnya terlihat sangat kecil. Hal ini terindikasikan dari Kurva Lorenz tahun 2013 yang semakin menjauh jaraknya ke garis diagonal yang menyiratkan distribusi pendapatan yang makin tidak merata.

Gambar 4.3.

Kurva Lorenz dari Rasio Gini Kabupaten Magelang tahun 2005-2013



Sumber : Susenas 2005-2013

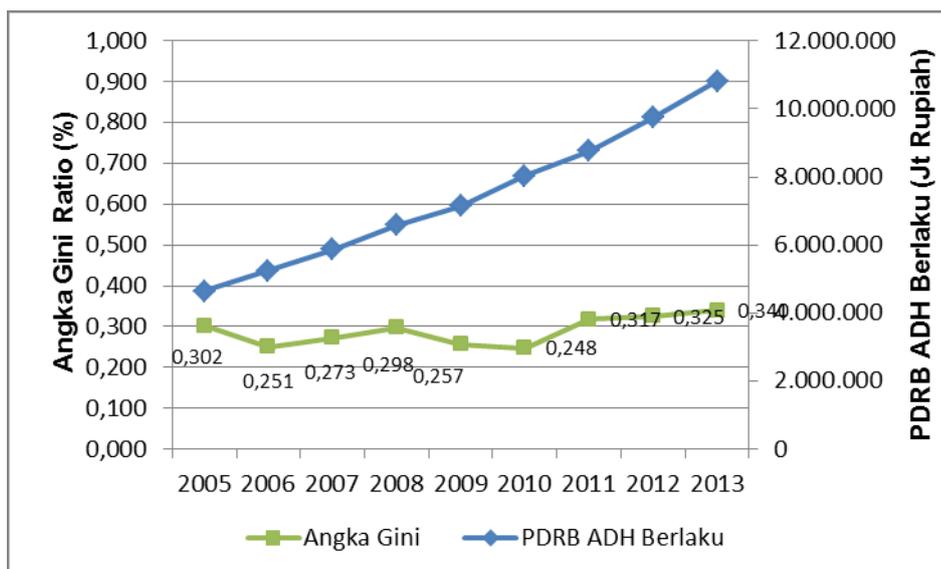
Mengingat bahwa Kurva Lorenz tidak menunjukkan suatu nilai kuantitatif, maka seberapa besar pergeseran kurva tersebut tidak terukur. Ukuran secara kuantitatif akan dijelaskan pada sub bab berikutnya, yaitu dengan indikator rasio gini.

4.3.2. Rasio Gini

Visualisasi dengan Kurva Lorenz menjelaskan distribusi pendapatan penduduk tanpa memberikan nilai kuantitatif yang dapat dibandingkan. Dengan Rasio gini, ukuran tinggi atau rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan penduduk secara kuantitatif, lebih terbandingkan. Rasio gini merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Besaran koefisien Gini atau Rasio gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Distribusi pendapatan antar penduduk di suatu daerah dapat dikatakan merata jika rasio gini mendekati angka 0, demikian juga sebaliknya distribusi pendapatan penduduk suatu daerah akan semakin tidak merata (timpang) jika rasio gini mendekati angka 1.

Berdasarkan hasil SUSENAS 2013 Rasio gini Kabupaten Magelang tahun 2013 adalah sebesar 0,34. Angka ini menunjukkan nilai $< 0,4$ yang berarti bahwa Kabupaten Magelang termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah, kendati seiring berkembangnya tahun semakin tidak merata. Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa pemerintah Kabupaten Magelang telah melaksanakan pembangunan yang hasilnya telah dapat dinikmati oleh penduduk Kabupaten Magelang, baik oleh penduduk yang berpenghasilan tinggi maupun penduduk yang memiliki ekonomi rendah. Namun demikian pemerataan tersebut belum mencapai maksimal.

Gambar 4.4.
Perbandingan Rasio Gini dan PDRB ADHB Kabupaten Magelang, 2005-2013



Sumber : Susenas 2013

Dari Gambar 4.4 terlihat bahwa tingkat pemerataan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2005 menghasilkan rasio gini sebesar 0.302. Sedangkan pada tahun 2013, rasio gini mengalami peningkatan atau pergeseran yang cenderung menjauh dari garis pemerataan.

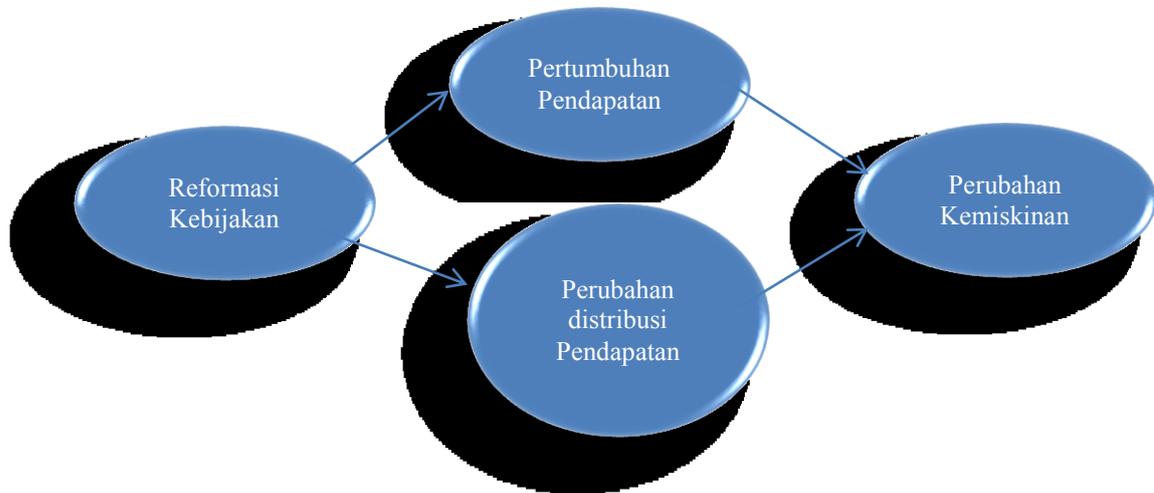
Dengan adanya pergeseran rasio gini selama periode tahun 2005-2013 memberikan arti bahwa pada tahun 2013 ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Magelang sedikit melebar dibandingkan dengan distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Magelang yang terjadi pada tahun 2005, ini mengindikasikan semakin melebarnya ketimpangan pendapatan diantara kelompok penduduk. Hal ini perlu untuk menjadi perhatian karena perubahan tersebut mengisyaratkan kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Magelang untuk terus melakukan kerja keras dalam memberikan dukungan kepada masyarakat misalnya dengan meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dikelola masyarakat terutama yang bergerak pada usaha kecil dan menengah.

Selanjutnya ketika dilakukan perbandingan antara perkembangan PDRB ADHK dan rasio gini terlihat bahwa peningkatan perekonomian yang terjadi di Kabupaten Magelang tidak disertai adanya pemerataan pendapatan, bahkan cenderung untuk semakin tidak merata. Sehingga sudut pandang yang meyakini bahwa proses pembangunan memiliki efek penetasan ke bawah atau yang lebih dikenal dengan istilah *trickle down effect* dari pertumbuhan PDRB di Kabupaten Magelang ternyata masih menyisakan masalah kesenjangan pendapatan.

Sehingga pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Magelang harus terus berkomitmen dalam paradigma pembangunan yang mengacu pada strategi “pertumbuhan disertai dengan pemerataan” atau *growth with equity* dengan pilarnya *triple track strategy: pro-growth, pro-job, dan pro-poor*.

Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Magelang harus dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan yakni PDRB serta pemerataan pendapatan. Hubungan ketiga elemen tersebut digambarkan dalam bentuk hubungan segitiga pertumbuhan, ketidakmerataan dan kemiskinan oleh Bourguignon (2004). Keterkaitan tiga elemen kebijakan dengan *growth with equity* akan bermuara pada *pro-poor growth* dengan strategi kebijakan yang digambarkan oleh Lopez (2011) sebagai berikut:

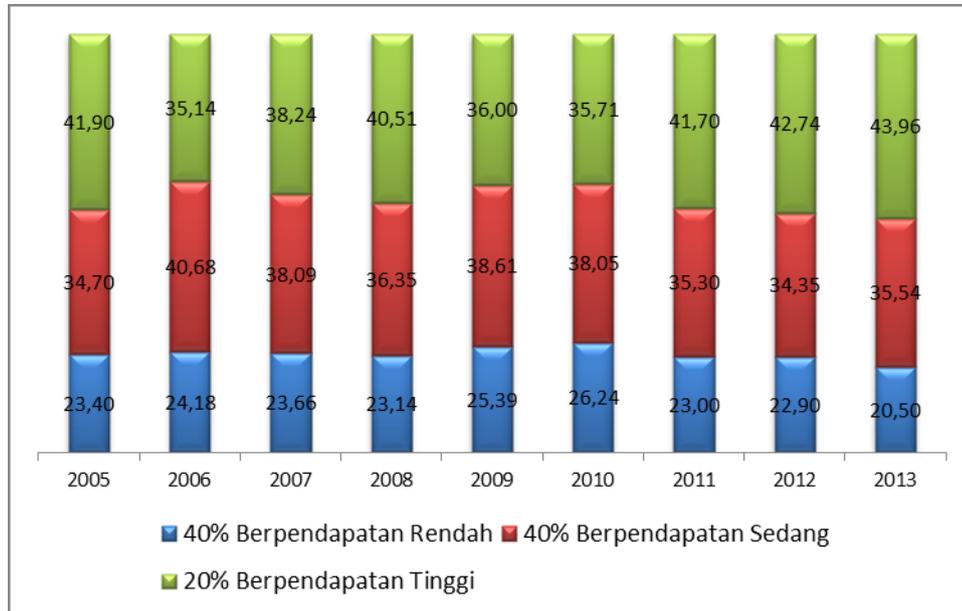
Gambar 4.5.
Hubungan Pertumbuhan Pendapatan, Distribusi Pendapatan,
dan Kebijakan Pembangunan



4.3.3. Ukuran Ketimpangan Bank Dunia

Pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk terus dipantau perkembangannya, karena upaya pemerintah dalam pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan jangka panjang. Karena ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan diantara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan banyak masalah-masalah sosial. Selain indikator tersebut diatas, indikator lain yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan pembagian (distribusi) pendapatan adalah distribusi persentase pendapatan yang diterima seluruh masyarakat baik kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah, berpendapatan sedang (menengah) dan kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi (kriteria Bank Dunia). Berikut hasil penghitungan distribusi persentase pendapatan penduduk Kabupaten Magelang tahun 2015-2013:

Gambar 4.6
Distribusi Persentase Pendapatan Penduduk Kabupaten Magelang,
2005-2013



Sumber : Susenas

Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia distribusi pendapatan di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa dari seluruh pendapatan masyarakat Kabupaten Magelang pada tahun 2013, sebesar 20,50 persen dapat dinikmati oleh 40 persen kelompok penduduk berpendapatan rendah. Sedangkan 40 persen kelompok penduduk berpenghasilan menengah memperoleh porsi pendapatan sebesar 35,54 persen. Sementara itu, sebesar 43,96 persen dari seluruh pendapatan dinikmati oleh sebanyak 20 persen kelompok penduduk berpenghasilan tinggi.

Kelompok yang menjadi fokus dalam penghitungan berdasar Kriteria Bank Dunia ini adalah kelompok 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok ini menunjukkan distribusi pendapatan penduduknya semakin merata. Pada tahun 2013 kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah di Kabupaten Magelang menikmati sebesar 20,50 persen pendapatan. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia, pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah ini tergolong tinggi, karena berdasarkan klasifikasi Bank Dunia untuk total pendapatan yang dinikmati 40 persen

penduduk berpendapatan rendah jika >17 persen dari total pendapatan, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi pada kategori ketimpangan rendah.

Meskipun begitu, 40 persen penduduk lapisan sedang/menengah dan 20 persen penduduk lapisan atas/tinggi masih menerima pembagian pendapatan relatif lebih tinggi dibandingkan 40 persen penduduk terendah. yaitu 35,54 dan 43,96 persen dari total pendapatan. Hal ini mengandung pengertian bahwa dampak kemajuan pembangunan lebih dirasakan untuk penerima pendapatan kelompok sedang dan tinggi. Idealnya untuk kelompok penerima pendapatan sedang dan tinggi mampu mentransfer ke kelompok penerima pendapatan rendah sehingga akan lebih merata.

Tabel 4.2.
Distribusi Persentase Pendapatan Penduduk Kabupaten Magelang
Tahun 2005-2013

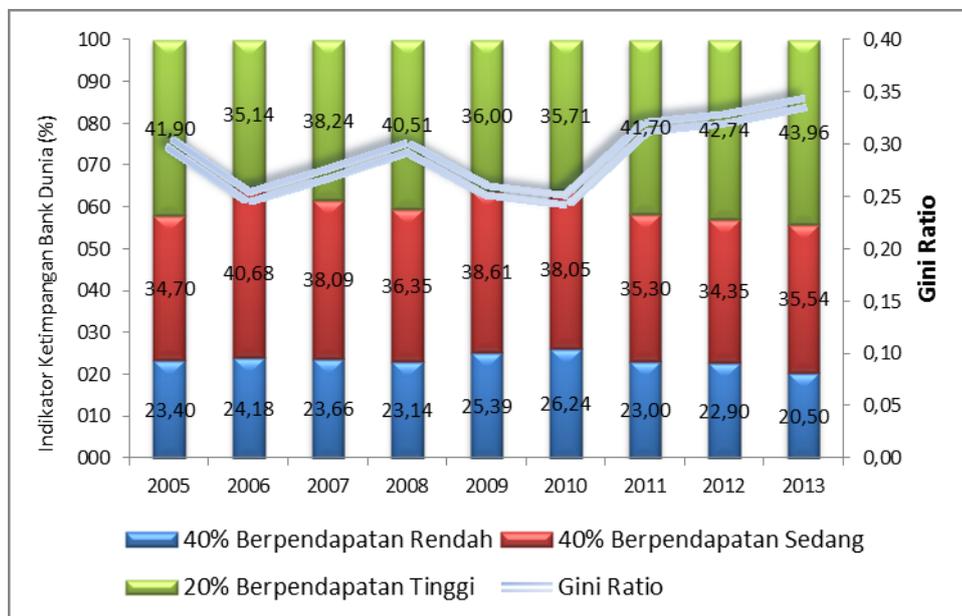
No	Tahun	40% Berpendapatan Rendah	40% Berpendapatan Sedang	20% Berpendapatan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2005	23,40	34,70	41,90
2	2006	24,18	40,68	35,14
3	2007	23,66	38,09	38,24
4	2008	23,14	36,35	40,51
5	2009	25,39	38,61	36,00
6	2010	26,24	38,05	35,71
7	2011	23,00	35,30	41,70
8	2012	22,90	34,35	42,74
9	2013	20,50	35,54	43,96

Sumber : Susenas

Berdasarkan tabel 4.2 pada tahun 2012 dan 2013 terlihat bahwa penduduk yang termasuk 40 persen berpendapatan rendah mengalami penurunan penerimaan pendapatan dari total seluruh pendapatan yaitu dari 22,90 persen menjadi 20,50 persen. Namun untuk penduduk dengan kelompok 40 persen berpendapatan sedang mengalami kenaikan penerimaan pendapatan dari total seluruh pendapatan dari 34,35 persen menjadi 35,54 persen. Sedangkan peningkatan persentase pendapatan terjadi pada kelompok 20 persen berpendapatan tinggi yaitu 42,74 persen menjadi 43,96 persen. Secara umum, selama periode 2005-2013 persentase porsi pendapatan yang dinikmati kelompok 40 persen berpendapatan rendah mengalami penurunan.

Menurut Kriteria Bank Dunia, secara umum tingkat kesenjangan distribusi pendapatan di Kabupaten Magelang dalam kurun 2005 sampai dengan tahun 2013 tergolong relatif rendah (*low inequality*). Ini ditunjukkan oleh kelompok 40 % dari penduduk berpendapatan rendah yang menikmati pendapatan sekitar 20 persen dari pendapatan regional yang di hasilkan oleh penduduk Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tersebut.

Gambar 4.7
Perbandingan Rasio Gini dan Distribusi Persentase Pendapatan
Penduduk Kabupaten Magelang, 2005-2013



Sumber : Susenas

Ketimpangan yang rendah bukan berarti harus membuat Pemerintah Kabupaten Magelang berpuas diri, peningkatan angka rasio gini dari tahun ke tahun mengharuskan

kerja yang lebih keras lagi guna meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, sehingga persentase pendapatan yang dinikmati oleh penduduk berpendapatan rendah dapat lebih ditingkatkan lagi yang ditandai dengan menurunnya porsi pendapatan yang diterima oleh sekelompok kecil masyarakat yang berpendapatan tinggi. Dalam hal ini memberikan peluang berusaha bagi penduduk berpendapatan rendah akan lebih bermakna.

Berkaitan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Magelang yang sedang giat mengentaskan kemiskinan melalui kegiatan ekonomi produktif, diharapkan pada masa yang akan datang baik Rasio gini maupun distribusi pendapatan menurut klasifikasi Bank Dunia dapat menunjukkan angka yang lebih baik lagi yang ditandai dengan semakin mengecilnya Rasio gini dan semakin besarnya porsi pendapatan yang dapat dinikmati oleh 40 persen penduduk yang berpendapatan rendah.

4.3.4. Indeks Theil T, Indeks Theil L dan Ketimpangan Atkinson

Ukuran ketimpangan selain rasio gini dan ukuran Bank Dunia seperti Indeks Theil T, Indeks Theil L dan Ketimpangan Atkinson dihitung untuk melihat apakah ada pola ketimpangan yang sama dengan penghitungan sebelumnya.

Tabel 4.3.
Indeks Theil T, Indeks Theil L dan Ketimpangan Atkinson
di Kabupaten Magelang Tahun 2007-2013

No	Tahun	<i>General Entropy Index</i>		<i>Atkinson Index</i>		
		GE(0) Theil's L	GE(1) Theil's T	A(0,5)	A(1)	A(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2007	0,1262	0,1482	0,0654	0,1186	0,2034
2	2008	0,1674	0,2062	0,0879	0,1541	0,2519
3	2009	0,1238	0,1389	0,0635	0,1165	0,1995
4	2010	0,1249	0,1580	0,0671	0,1174	0,1922
5	2011	0,1933	0,2561	0,1041	0,1758	0,2699
6	2012	0,1798	0,2358	0,0966	0,1646	0,2581
7	2013	0,2559	0,3678	0,1396	0,2259	0,3318

Sumber : Susenas 2013

Secara umum hasil penghitungan Indeks Theil T, Indeks Theil L dan Ketimpangan Atkinson sama dengan pergeseran rasio gini selama periode tahun 2007-2013. Di mana pada tahun 2013 ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Magelang sedikit melebar dibandingkan dengan distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Magelang yang terjadi pada tahun 2007. Demikian halnya dengan nilai Indeks Theil T, Indeks Theil L dan Ketimpangan Atkinson selama periode 2007 – 2013 ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan semakin melebar atau kesenjangan pendapatan masyarakat semakin besar ditandai dengan nilai indeks yang semakin besar.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan.

Tingkat kemiskinan atau jumlah dan persentase orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan merupakan permasalahan pokok Negara berkembang. Sejumlah pakar pembangunan telah menekankan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi namun juga melihat kualitas dari pertumbuhan. Penekanan baru ini menandai bahwa ada banyak hal lain yang penting selain dari angka tingkat pertumbuhan ekonomi. Antara lain, apakah pertumbuhan didistribusikan secara merata pada semua kelompok pendapatan, apakah kue pertumbuhan hanya menguntungkan sektor tertentu atau seluruh sektor masyarakat, dan apakah pertumbuhan memainkan peran yang positif atau negatif dalam mencapai kesetaraan pendapatan regional yang pada akhirnya apakah pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan kesetaraan kesejahteraan anggota masyarakat.

Publikasi “Penduduk Miskin dan Pemerataan Pendapatan Kabupaten Magelang Tahun 2013” memberi kesimpulan tentang perkembangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Magelang, yaitu :

1. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode 2004 – 2013 menunjukkan penurunan
2. Pendapatan masyarakat miskin Kabupaten Magelang semakin meningkat selama periode analisis ditandai dengan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan (Indeks Kedalaman Kemiskinan/ P_1) semakin rendah.
3. Ketimpangan pendapatan atau penyebaran rata-rata pendapatan diantara penduduk miskin semakin sempit ditandai dengan angka indeks keparahan (P_2) semakin rendah.
4. Adanya inefisiensi pelaksanaan bantuan program penanggulangan kemiskinan dibuktikan dengan ditemukannya beberapa program bantuan pengentasan kemiskinan yang tidak dinikmati oleh penduduk berpenghasilan rendah saja tapi juga berpenghasilan tinggi.
5. Tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik ditandai dengan semakin kecil porsi pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan.

6. Ketimpangan distribusi pendapatan semakin meningkat ditandai dengan angka rasio gini, indeks Theil T, Ketimpangan Atkinson semakin mendekati angka satu dan persentase porsi pendapatan yang dinikmati kelompok 40 persen berpengeluaran rendah versi Bank Dunia mengalami penurunan.

5.2. Saran.

Muara akhir dari pelaksanaan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Realitas data statistik menunjukkan tahun 2013 masih ada 13,96 persen atau 171,0 ribu jiwa penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan penduduk semakin lebar di Kabupaten Magelang. Capaian pelaksanaan program pembangunan ini dapat dijadikan indikasi sejauh mana pelaksanaan program khususnya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara efektif.

Monitoring dan evaluasi program merupakan hal yang standar dilakukan terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, sebagaimana halnya program dan kegiatan lainnya dalam proses pembangunan. Namun demikian, monitoring dan evaluasi lebih banyak dilakukan terhadap aspek administratif proyek dan bukan berkaitan dengan substansi, proses dan pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, di antara sejumlah program dan kegiatan yang dilakukan tidak satu pun diketahui efektivitasnya sehingga belum ada alasan yang kuat apakah program tetap dilanjutkan atau harus dimodifikasi. Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan cenderung dilihat sebagai kegiatan “proyek” yang dipandang lebih banyak dari sudut pendanaan dibandingkan dengan capaian substansi.

Sebagai kegiatan proyek, maka pelaksanaannya tidak dilihat sebagai bagian tugas dan fungsi instansi yang terkait dengan itu. Bila kegiatan penanggulangan kemiskinan menggunakan pendekatan pemberdayaan yang seharusnya menjadi bagian tugas dari Badan/Kantor pemberdayaan di provinsi/kabupaten/kota, sejauh ini justru tidak melibatkan instansi tersebut secara intens. Demikian juga halnya bila dilakukan melalui pendekatan kelembagaan ekonomi berupa koperasi, namun instansi yang mengurus perkoperasian tidak terlibat di dalam skenario pelaksanaannya. Kondisi yang demikian menyebabkan program pengentasan kemiskinan tertentu akan hilang dan tidak berbekas apabila periode “proyek” sudah berakhir.

Beranjak dari realitas yang ada sebagaimana dikemukakan di atas, ke depan **kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu penajaman-penajaman** sehingga efektivitas program dapat diwujudkan karena kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensi sehingga penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan parsial dan sektoral namun harus dilakukan secara sistemik, terencana dan terintegrasi. Koordinasi lintas sektoral, sinkronisasi beragam program dan sinergi berbagai kegiatan perlu diwujudkan.

Dari sisi metodologi, persentase dan jumlah penduduk miskin ditentukan oleh perubahan Garis Kemiskinan (GK) yang perhitungannya diwakili oleh 52 jenis komoditas kebutuhan dasar makanan. Perkembangan harga komoditas tersebut tentunya akan berdampak pada kenaikan angka Garis Kemiskinan sehingga penduduk dengan pendapatan berada disekitar GK yang sebelumnya tidak berkategori miskin akibat kenaikan GK menjadi berkategori miskin. Kebijakan **pengendalian harga kebutuhan dasar** makanan khususnya komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin yakni beras menjadi program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Hasil analisis menunjukkan sebagian besar penduduk miskin bekerja di lapangan usaha pertanian dan konstruksi. **Peningkatan pendapatan di lapangan usaha pertanian** dapat dilakukan dengan mengurangi biaya produksi pertanian dengan subsidi dan meningkatkan produksi pertanian dengan jalan lebih intens memberikan penyuluhan dan pelatihan ketrampilan bertani, sedangkan penduduk miskin di lapangan usaha konstruksi peningkatan pendapatan buruh konstruksi dapat dilakukan dengan menetapkan standarisasi pengupahan buruh konstruksi.

Sementara itu, kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar penduduk dapat dilakukan dengan **memperbesar penduduk pada kelompok pengeluaran kelas menengah** yakni antara 200 000 rupiah – 749 999 rupiah dengan upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut :

Pertama, **pengembangan sumber daya manusia**, terutama di daerah pedesaan/pinggiran. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan melibatkan masyarakat pinggiran dalam jaringan komunitas. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sangat penting melalui upaya-upaya yang memungkinkan masyarakat setempat memanfaatkan sumberdaya alam mereka, misalnya latihan ketrampilan berbasis potensi lokal.

Kedua, **mempercepat penyediaan infrastruktur dasar** dapat dilakukan dengan cara melakukan pembagian pelaksanaan. Pembangunan infrastruktur dasar daerah pedesaan/pinggiran dan terpencil, termasuk infrastruktur fisik (jalan, listrik dan air) serta pendidikan dan kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah. Infrastruktur yang menghasilkan keuntungan di daerah-daerah yang lebih sejahtera dialihkan ke sektor swasta atau kerjasama dengan investor dari luar Kabupaten Magelang.

Ketiga, **membangun daerah-daerah pedesaan/pinggiran melalui kegiatan usaha pertanian dan non pertanian dengan cara mengenalkan dan mengembangkan teknologi pasca panen** mengingat sebagian besar penduduk Kabupaten Magelang berusaha di lapangan usaha pertanian. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator untuk penyediaan infrastruktur, pendidikan, ketrampilan, kredit, dan lain-lain, yang mempengaruhi pengembangan kegiatan usaha tersebut.

Tim Penyusun

Penanggung Jawab : Sri Handayani, SE, MM

Editor : Alfitri Suryaningsih, SSi, MA

Penyusun :

1. Subuh Sukmono Putro, SST, M.Ec.Dev
2. Joko Permono
3. Ahmad Taufiq, SST
4. Tri Murni HK, SST

